

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 539-551**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033344>**

## **Peran Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam dalam Transisi Politik Kesultanan Deli Pasca Kemerdekaan Indonesia 1945–1967**

*The Role of Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam in the Political Transition of the Deli Sultanate in Post-Independence Indonesia, 1945–1967*

**Risky Pratama<sup>1</sup>, Achiriah<sup>2</sup>, Katsron Nasution<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [riski0602213029@uinsu.ac.id](mailto:riski0602213029@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [achiriah@uinsu.ac.id](mailto:achiriah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [kasron@uinsu.ac.id](mailto:kasron@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pada masa kekuasaan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam dalam transisi politik Kesultanan Deli pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945–1967, ditandai oleh perubahan radikal dari sistem kerajaan menuju sistem republik yang menolak feodalisme. Kesultanan Deli sebagai lembaga adat mengalami tekanan sosial dan politik, terutama saat Revolusi Sosial 1946 yang menyebabkan keruntuhan banyak Kesultanan di Sumatera Timur. Namun, Sultan Osman mampu mempertahankan eksistensi Kesultanan melalui strategi non-konfrontatif dan pendekatan kultural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Sultan Osman beradaptasi dengan dinamika politik nasional, serta bagaimana ia menjaga identitas budaya Melayu di tengah krisis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah, melalui pengumpulan data dari dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan teori transisi politik dan legitimasi kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kehilangan kekuasaan formal, Sultan Osman tetap memainkan peran penting sebagai simbol budaya, pemersatu sosial, dan pelindung nilai-nilai tradisi Melayu. Ia menjadi contoh keberhasilan transformasi peran elite tradisional dalam menghadapi perubahan zaman secara damai dan bermartabat.

**Kata Kunci :** *Kesultanan Deli, Pasca Kemerdekaan, Sultan Osman, Transisi Politik.*

### **Abstract**

*During the reign of Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam in the post-independence political transition of the Deli Sultanate (1945–1967), a radical shift occurred from a monarchical system to a republican system that rejected feudalism. The Deli Sultanate, as a traditional institution, experienced significant social and political pressure, particularly during the 1946 Social Revolution, which led to the collapse of many sultanates in East Sumatra. However, Sultan Osman was able to maintain the existence of the Sultanate through non-confrontational strategies and a cultural approach. This study aims to examine how Sultan Osman adapted to national political dynamics and how he preserved Malay cultural identity amid crisis. The research employs a qualitative method with a historical approach, collecting data through documentation, field observations, and interviews. The analysis uses theories of political transition and power legitimacy. The findings indicate that despite losing formal political power, Sultan Osman continued to play an important role as a cultural symbol, social unifier, and guardian of Malay traditional values. He represents a successful example of the transformation of traditional elites in facing changing times in a peaceful and dignified manner.*

**Keywords:** *Deli Sultanate; Post-Independence; Sultan Osman; Political Transition.*

### **Article Info**

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 18 December 2025

## **PENDAHULUAN**

Kemerdekaan Kerajaan Haru dari Aceh pada tahun 1669, menyebabkan wilayah Haru di Medan berganti nama menjadi Kesultanan Deli. Sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan Deli didirikan pada awal abad ke-17 dan bertahan hingga pertengahan abad ke-20. Sekarang berfungsi sebagai pemangku adat, meskipun Kesultanan masih ada. Kerajaan Deli telah mengalami banyak hal selama sejarahnya yang panjang, termasuk masa kejayaan dan kehancuran. Deli pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh dua kali, sebelum kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura saat kekuatan Siak menguat di Bengkalis. Setelah itu, Deli

menjadi wilayah yang ditaklukan oleh penjajah Belanda, dan akhirnya bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan. (Takari, B.S., and Dja'far 2012).

Pasca kemerdekaan Indonesia Kesultanan Deli di pimpin oleh Sultan Otteman Al sani perkasa alamsyah atau biasa di kenal dengan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam . Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam merupakan Sultan ke 11 yang memimpin kesultanan Deli pada tahun 1945 – 1967. Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam yang terlahir pada tahun 20 Agustus 1900 hijriah didalam Istana dikota Maimun Deli (Harahap, Triase, and Muliani Harahap 2024). Pada masa kepemimpinan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam, Kesultanan Deli menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan sistem pemerintahan, konflik sosial, serta pergeseran peran tradisional Kesultanan dalam politik modern. Dalam periode ini, Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan baru Indonesia.

Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam naik takhta pada masa yang penuh dengan gejolak politik, terutama dengan meningkatnya pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sultan Osman, baik dalam hubungan dengan pemerintah Indonesia maupun dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Deli sebagai bagian dari budaya dan sejarah Sumatera Utara, menjadi aspek penting yang perlu diteliti. Dengan memahami peran Sultan Osman Al Sani dalam transisi politik ini, kita dapat melihat bagaimana kesultanan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya. Berdasarkan latar belakang sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam dalam transisi politik Kesultanan Deli pasca kemerdekaan Indonesia 1945 – 1967.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah, melalui pengumpulan data dari dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan teori transisi politik dan legitimasi kekuasaan. penelitian ini dilakukan di Istana Mainun kecamatan Medan Maimun Kota Medan waktu penelitian akan berlangsung dari february sampai April 2025. Subjek dalam penelitian ini adalah arsip dokumen tentang Sultan Deli dan keluarga Kesultanan Deli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transisi politik merupakan suatu proses perubahan sistem pemerintahan dari tatanan lama menuju tatanan baru yang berbeda secara fundamental, baik dalam hal ideologi, struktur kekuasaan, maupun pranata sosial yang mendukungnya. Dalam konteks Indonesia, transisi politik yang paling signifikan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, saat negara Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan republik yang merdeka dan berdaulat, menggantikan struktur kekuasaan kolonial Belanda dan Jepang. Proses ini tidak berjalan secara linear dan damai; ia melibatkan pergeseran kekuasaan yang rumit antara struktur pemerintahan kolonial, kekuatan revolusioner rakyat, dan lembaga-lembaga tradisional seperti Kesultanan yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem politik kolonial (Mahalli & Yani, 2020). Kesultanan Deli merupakan salah satu institusi tradisional yang terdampak langsung oleh perubahan besar ini. Sebagai Kesultanan Melayu yang telah berdiri sejak abad ke-17 dan memiliki relasi formal dengan pemerintah Hindia Belanda, Kesultanan Deli menghadapi krisis legitimasi dalam menghadapi sistem republik yang menolak feodalisme (Sumanti & Batubara, 2019).

Transisi dari kekuasaan kolonial ke republik membawa dinamika yang kompleks terhadap tatanan sosial politik lokal, termasuk tekanan terhadap lembaga-lembaga tradisional seperti Kesultanan. Sistem kerajaan, yang kerap dipersepsikan sebagai bagian dari struktur feodal peninggalan kolonial,

menghadapi tantangan eksistensial di tengah semangat revolusi dan pembangunan negara kesatuan berbasis demokrasi. (Wijaya & Yanti, 2020).

### **Kesultanan Deli dalam Bayang-Bayang Revolusi**

Kesultanan Deli merupakan salah satu Kesultanan paling strategis dan berpengaruh di Sumatera Timur pada masa kolonial. Dengan kedekatannya terhadap pemerintah Hindia-Belanda dan keterlibatannya dalam sistem perkebunan tembakau, Deli menjadi pusat kekuasaan feodal yang sangat bergantung pada keberlangsungan struktur kolonial. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Kesultanan Deli menunjukkan sikap yang ambigu. Di permukaan, pihak Kesultanan turut mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda simbolik dukungan terhadap Republik. Namun secara politik, tidak tampak adanya komitmen nyata terhadap pemerintahan baru. Sebaliknya, sikap yang muncul lebih mengarah pada harapan bahwa Belanda atau NICA akan kembali dan mengembalikan status serta hak-hak istimewa yang sebelumnya mereka nikmati (Sri Rahayu et al., 2024).

Sikap pasif dan ambigu dari Kesultanan Deli ini memperparah ketegangan antara elit feodal dan kelompok pro-republik. Sultan Osman Al Sani sendiri tidak tercatat mengambil inisiatif untuk melakukan konsolidasi politik, berdialog dengan tokoh-tokoh Republik, atau menyusun kebijakan kompromi. Ketika tekanan sosial dan politik dari kelompok pemuda, buruh perkebunan, dan laskar kiri meningkat, Sultan Osman memilih untuk menarik diri dari arena politik. Tidak ditemukan dokumen atau bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sultan Osman Al Sani secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, kekuasaan Kesultanan Deli tidak diserahkan, tetapi diambil alih secara sepihak dan paksa melalui aksi revolusioner yang penuh kekerasan (Maulimardewa et al., 2023). Situasi ini mengindikasikan bahwa transisi kekuasaan tidak terjadi dalam koridor hukum dan konstitusi, melainkan melalui tekanan massa yang didorong oleh kebencian historis dan hasutan ideologis.

Dalam konteks Revolusi Sosial 1946 yang melanda Sumatera Timur, sikap Sultan Osman Al Sani dari Kesultanan Deli memperlihatkan kehati-hatian yang mencolok, tetapi juga membuka ruang kritik yang mendalam. Pada saat situasi mulai memanas, dan kelompok-kelompok radikal mulai melakukan tindakan kekerasan terhadap bangsawan Melayu, Sultan Osman memilih untuk tidak berada di tempat. Ia dilaporkan sedang berada di Malaysia dan tidak kembali ke tanah air selama puncak kekacauan tersebut berlangsung. Menurut Mohar dalam wawancara ia mengatakan bahwa sultan tidak melarikan diri melainkan sedang melakukan diplomasi ke Perak sebab istri Sultan ialah ahli diraja Negri Perak. Namun menurut Tengku Lukman Sinar dalam bukunya “Bangung dan Runtunya Kerajaan Melayu di Sumatera timur” bahwa pada April 1946 pada saat gejolak revolusi sedang memanas terhadap sultan-sultan sumatera timur terutama lagi hancur Istana Kota Maksu/Istana Puri, maka oleh karena itu Sultan Deli beserta keluarganya mengungsi ke Penang. Sultan memerintahkan sekretarisnya yakni Tuan Phol ( berkebangsaan Ceko) ke Singapura untuk menjumpai konjen Belanda, setelah sampai Tuan Phol meminta bantuan uang dengan beberapa perusahaan belanda dan menjanjikan pada saat kondisi Sumatera Timur membaik meraka akan diberikan konsensi perkebunan dan minyak.(Sinar,2019)"Nefis (*Netherlands Forces Intelligence Service*) di Singapura telah mewawancarai Sultan Deli tanggal 16-11-1946 melaporkan

- Sultan akan ke Holland untuk berobat.
- Pemerintah Belanda tidak ada perhatian padanya ketika istananya diserang. Ketika itu minta kepada pamannya Sultan Perak sebagai pelindung besar Belanda di Medan. Dia tinggal di Perak dan Sultan Perak setuju.
- Jika di Nederland nanti akan menemui Duta Inggris mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuannya melindungi Sultan Deli di Medan dan juga ketika diminta pada Inggris agar melindungi Sultan Langkat.

- Nanti bulan Maret 1947 Sultan akan ke Medan musyawarah dengan Orang-orang Besarnya."(Sinar,2019)

Kepergian Sultan Osman juga menunjukkan keterputusan politik antara elite feodal Melayu dengan dinamika revolusi yang sedang berlangsung. Tidak ada upaya signifikan dari pihak Sultan untuk membangun jembatan dialog dengan kelompok revolusioner, maupun mengusulkan transisi kekuasaan yang damai. Komunikasi yang dijaga dari jarak jauh meskipun ada—tidak cukup kuat untuk menahan gelombang kebencian sosial yang diarahkan kepada simbol-simbol kolonial dan feodal. Ketidakhadiran fisik Sultan Osman di wilayahnya memperkuat kesan bahwa kekuasaan Kesultanan sudah kehilangan legitimasi di mata rakyat, sekaligus mempercepat keruntuhannya secara *de facto* (Maulimardewa et al., 2023). Dalam konteks ini, kepergian ke Malaysia bukan hanya tindakan menyelamatkan diri, tetapi juga bentuk kegagalan dalam menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan sultan-sultan lain yang tetap tinggal dan kemudian menjadi korban pembunuhan, sikap Sultan Osman memang menyelamatkannya dari nasib tragis. Akan tetapi, narasi penyelamatan diri ini tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan etis: apakah keselamatan pribadi lebih utama daripada tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang dipimpinnya? Ketika Kesultanan-Kesultanan lain di Sumatera Timur runtuh dengan tragis karena ditinggalkan oleh pemimpinnya atau dibungkam oleh kekerasan, ketidakhadiran Sultan Osman dalam momen-momen krusial sejarah Deli turut mengukuhkan kegagalan sistem feodal untuk mereformasi dirinya dan berdialog dengan semangat republik yang tengah tumbuh (Sri Rahayu et al., 2024; Maulimardewa et al., 2023). Karena itu, meskipun dapat dimaklumi dari sudut keselamatan, kepergian Sultan Osman ke Malaysia tetap menjadi bagian dari kritik sejarah terhadap lemahnya daya adaptasi dan kepemimpinan elite tradisional Melayu di tengah arus revolusi nasional.

Dalam peristiwa Revolusi Sosial 1946, Kesultanan Deli menjadi salah satu sasaran utama gerakan pembebasan rakyat yang disusupi agenda radikal. Istana dan simbol-simbol Kesultanan menjadi target perusakan dan perampasan. Meskipun tidak seterkenal tragedi yang terjadi di Kota Pinang atau Asahan, kekuasaan Sultan Osman dan struktur bangsawan Melayu di Deli juga mengalami kehancuran secara sistematis. Terjadi :

- (a) pengambilalihan paksa kekuasaan administratif oleh komite rakyat,
- (b) penghapusan hak-hak istimewa Kesultanan tanpa proses hukum, dan
- (c) pembubaran sistem adat tanpa keterlibatan pemangku adat dalam perundingan.

Yang paling tragis dari tindakan radikal tersebut adalah hilangnya ruang untuk rekonsiliasi dan partisipasi damai dalam pembangunan bangsa. Sultan Osman Al Sani tidak diberi kesempatan untuk menyatakan sikapnya secara terbuka di ruang publik. Bahkan jika ada keinginan dari pihak Kesultanan untuk beradaptasi dengan struktur republik, peluang itu telah dirampas oleh tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh kelompok revolusioner. Komite-komite rakyat dan laskar pemuda yang dipengaruhi ideologi kiri mengambil alih kekuasaan dengan kekuatan senjata dan tekanan massa, bukan melalui musyawarah atau hukum (Sri Rahayu et al., 2024). Mereka tidak hanya meruntuhkan kekuasaan, tetapi juga mencabut akar budaya Melayu yang melekat dalam sistem Kesultanan. Aksi kekerasan ini melahirkan sebuah preseden buruk: bahwa legitimasi kekuasaan dapat direbut bukan melalui suara rakyat yang sah, tetapi melalui paksaan dan pembungkaman.

### **Pasca Revolusi di Kesultanan Deli**

Pasca meletusnya Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946, yang ditandai dengan kerusuhan, pembakaran, dan pembunuhan terhadap elite bangsawan Melayu dan pemuka adat oleh kelompok-kelompok revolusioner rakyat, posisi Kesultanan Deli mengalami kemunduran drastis dari sisi politik dan ekonomi. Meskipun banyak Sultan dan bangsawan kehilangan kekuasaan atau nyawanya dalam peristiwa ini, Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam termasuk tokoh yang selamat dari arus

kekerasan tersebut. Setelah revolusi, Sultan Osman tidak lagi memegang kekuasaan politik administratif sebagaimana Sultan-Sultan terdahulu, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya sebagai figur simbolik dan pemimpin budaya masyarakat Melayu di Deli. Perannya bergeser menjadi penjaga nilai-nilai tradisi, hukum adat, dan simbol pemersatu masyarakat pasca-konflik. Ia tidak melakukan konfrontasi politik terhadap pemerintah Republik Indonesia yang mulai menguat di Sumatera Timur, melainkan memilih jalur integrasi dan pelestarian kebudayaan (Sumanti & Batubara, 2019).

Peran Sultan Osman dalam konteks pasca-revolusi juga bisa dilihat sebagai upaya pemulihan kehormatan Kesultanan Deli yang sempat tercoreng akibat serangan terhadap simbol-simbol feodalisme. Dalam suasana traumatis dan destruktif pasca-revolusi sosial, kehadiran Sultan sebagai tokoh adat yang tidak membalas kekerasan dengan kekerasan menjadi simbol perdamaian yang penting bagi masyarakat Melayu. Melalui tindakan ini, Sultan Osman menunjukkan kematangan politiknya dalam menjaga stabilitas sosial dan kultural masyarakat lokal yang tercerai-berai oleh konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dan Ramadhani (2019), revolusi sosial tidak hanya menghancurkan struktur kekuasaan lama, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam, sehingga diperlukan figur-figur yang mampu merekatkan kembali ikatan komunitas. Sultan Osman menempati peran ini melalui pendekatan budaya, bukan kekuasaan politik.

Tindakan strategis Sultan Osman adalah tidak terlibat langsung dalam konflik politik atau pertarungan kekuasaan di antara elit lokal, baik yang berasal dari kalangan republik maupun sisa-sisa bangsawan. Ia secara sadar mengambil posisi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Melayu, serta menjauh dari politik praktis yang kala itu penuh dengan ketegangan ideologis. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahalli dan Yani (2020), dalam masa transisi politik yang belum stabil, kehadiran pemimpin simbolik yang tidak terjebak dalam rivalitas politik sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang netral yang aman secara sosial. Dalam hal ini, Sultan Osman menjalankan fungsi tersebut dengan sangat efektif. Keberadaannya dianggap sebagai titik referensi sosial yang memberi ketenangan dan arah moral bagi masyarakat Melayu Deli yang masih berada dalam bayang-bayang trauma revolusi.

Sikap Sultan Osman ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki visi jangka panjang terhadap pelestarian Kesultanan Deli bukan sebagai kekuatan politik, tetapi sebagai sumber identitas kultural dan sejarah lokal. Ia tidak membentuk pasukan, tidak menyuarakan penolakan terhadap republik, bahkan tidak terlibat dalam wacana pembentukan negara tersendiri. Sebaliknya, ia memilih untuk merawat simbol-simbol Kesultanan melalui strategi kultural yakni mempertahankan keberadaan masjid, Istana, dan lembaga adat—sebagai ruang rekonsiliasi masyarakat Melayu pasca-konflik (Avionita, 2023). Pilihan taktis ini memperlihatkan bahwa tindakan Sultan Osman pasca-revolusi lebih banyak berfokus pada strategi konservasi budaya dan negosiasi sosial ketimbang aksi politik langsung.

Sultan Osman juga berperan penting dalam merawat struktur sosial masyarakat Melayu yang sempat terkoyak akibat trauma revolusi. Ia mendorong rekonsiliasi antar warga, baik antara kelompok bangsawan yang tersisa dengan rakyat biasa, maupun dengan komunitas non-Melayu seperti Batak, Tionghoa, dan India yang juga menjadi bagian dari struktur sosial Sumatera Timur. Dalam penelitian Avionita (2023), disebutkan bahwa Sultan Osman banyak terlibat dalam kegiatan sosial seperti pendidikan keagamaan, bantuan sosial kepada korban revolusi, serta pelestarian kebudayaan Melayu melalui perayaan adat dan kegiatan dakwah. Keterlibatan beliau dalam kegiatan sosial ini menjadi modal sosial yang penting bagi proses pemulihan masyarakat pasca konflik. Ia tidak hanya menjadi simbol pemersatu, tetapi juga motor penggerak nilai-nilai kebersamaan dan toleransi lintas etnis.

Tidak kalah penting adalah bahwa peran sosial Sultan Osman juga tercermin dari kemampuannya merawat jaringan kekerabatan yang luas di kalangan masyarakat Melayu dan luar Melayu. Ia menjaga hubungan dengan para datuk adat, tokoh ulama, serta pemangku adat dari wilayah-wilayah sekitarnya seperti Serdang, Langkat, dan Asahan. Sultan Osman sering kali bertindak sebagai mediator adat dalam menyelesaikan sengketa warisan, pertanahan, dan konflik sosial pasca-revolusi.

Peran ini dilakukan secara informal namun sangat berpengaruh karena kehadirannya tetap memberi bobot legitimasi tradisional di tengah absennya struktur negara yang stabil pada awal masa republik (Mahalli & Yani, 2020; Wijaya & Yanti, 2020).

Keberlanjutan Kesultanan sebagai simbol budaya tak lepas dari upaya Sultan Osman menjaga hubungan baik dengan pemerintah Republik Indonesia. Meski tidak duduk dalam pemerintahan, beliau tidak memusuhi negara. Sikap kooperatif ini menjadikan Kesultanan Deli tetap dihormati dalam banyak kebijakan daerah, bahkan hingga periode Orde Baru, di mana keluarga Kesultanan Deli beberapa kali diundang dalam acara kenegaraan dan adat resmi. Ini membuktikan bahwa meski tanpa kewenangan politik formal, Sultan Osman berhasil menempatkan diri dan institusi Kesultanan sebagai mitra sosial budaya pemerintah dalam membangun kohesi masyarakat.

### **Strategi Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam Pada Transisi Politik**

Strategi transisi politik merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses peralihan kekuasaan atau struktur politik dari suatu rezim, sistem, atau aktor dominan menuju tatanan politik yang baru—baik bersifat demokratis, otoriter, maupun oligarkis. Dalam kerangka ini, strategi transisi tidak semata-mata dimaknai sebagai serangkaian tindakan teknis, tetapi lebih dari itu, merupakan produk konstruksi sosial dan politik yang melibatkan aktor-aktor kunci, institusi, serta struktur kekuasaan yang ada (Wendt, 1992). Strategi ini mencakup proses rekonsiliasi, negosiasi kekuasaan, pembentukan konsensus, hingga manuver politik yang bersifat manipulatif untuk mempertahankan atau mengalihkan dominasi.

#### **1. Strategi Kultural Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam**

Strategi kultural Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam pada masa transisi politik merupakan upaya simbolik dan adaptif yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan identitas Kesultanan sebagai warisan adat dalam menghadapi perubahan sistem politik dari kolonial ke republik. Strategi ini bersandar pada prinsip dakwah kultural yang menekankan penyampaian pesan melalui pendekatan budaya masyarakat yang positif, bukan dengan cara struktural atau politik langsung. Artinya, Sultan Osman menggunakan pendekatan yang menyesuaikan diri dengan adat istiadat, simbol-simbol adat, dan norma sosial masyarakat Melayu Deli, agar keberadaan Kesultanan tetap diterima dan dihormati di tengah perubahan politik. Strategi kultural semacam ini bertujuan menciptakan ruang dialog antara budaya lokal dan kekuatan baru negara, dengan menghindari konfrontasi dan dominasi langsung, melainkan mengandalkan legitimasi budaya dan moral (Adde & Rifa'i, 2022; Kutbuddin, 2016).

Sultan menyadari bahwa kekuatan Kesultanan Deli tidak lagi bersumber dari otoritas politik formal, melainkan dari kemampuan mempertahankan legitimasi moral di hadapan masyarakat Melayu. Maka dari itu, beliau menjaga kesinambungan budaya melalui jalur agama, seperti penerapan *faraid* dalam pembagian warisan, dan melalui simbol-simbol adat yang masih dihormati masyarakat bawah. Strategi ini menjadi penting dalam konteks pasca-revolusi, saat banyak nilai lokal tercerabut akibat kekacauan politik dan kekerasan struktural terhadap bangsawan Melayu (Athief, 2024). Perubahan sosial yang sangat cepat membuat masyarakat kehilangan rujukan nilai, dan dalam titik inilah, peran simbolik Sultan Osman menjadi jangkar budaya yang menyatukan memori kolektif masyarakat Melayu Deli.

Sultan Osman memanfaatkan momen pasca-konflik untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebersamaan melalui forum-forum adat dan agama, serta secara simbolik mengangkat ulang marwah Melayu yang sempat runtuh. Ia sadar bahwa revolusi tidak hanya menghancurkan struktur feodal, tetapi juga melukai psikologi kolektif masyarakat Melayu yang selama ini bergantung pada relasi patron-klien Kesultanan. Maka, dengan membuka ruang dialog antara tradisi dan dinamika republik, Sultan memainkan peran sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan Osman menjalankan fungsi rekonsiliasi dalam kerangka budaya, bukan sekadar simbol identitas statis.

Athief (2024) mencatat bahwa dalam situasi kekosongan moral pasca revolusi, keberadaan Sultan menjadi simbol kontinuitas yang mampu meredam fragmentasi sosial. Dalam ruang sosial yang semakin terdesentralisasi oleh pengaruh negara dan pasar, kekuatan budaya lokal seperti yang dijaga Sultan Osman menjadi semacam “kompas nilai” bagi masyarakat Melayu Deli (Anwar, 2022). Strategi ini berhasil memulihkan kepercayaan kolektif masyarakat terhadap Kesultanan sebagai lembaga budaya, sekaligus memperkuat kembali jaringan solidaritas kultural Melayu yang sempat tercerai-berai.

Dengan menjadikan grant atas nama istri dan dirinya sendiri, Sultan Osman juga menyisipkan pesan bahwa struktur keluarga Kesultanan adalah pusat nilai dan pelindung adat. Ketika negara dan pasar mulai menggerus batas-batas komunitas adat, keluarga Sultan tampil sebagai simbol kesinambungan sejarah dan tatanan moral Melayu. Maka, di balik tindakan administratif tersebut tersembunyi upaya kultural yang mendalam: memperkuat kembali struktur nilai berbasis patron-klien tradisional, menghidupkan kehormatan keluarga Kesultanan sebagai penjaga marwah Melayu, serta memelihara ikatan sosial di tengah tekanan modernisasi dan perubahan politik yang massif (Athief, 2024; Anwar, 2022). Di sini, Sultan Osman tidak hanya mempertahankan tanah, tetapi memulihkan makna tanah sebagai bagian dari sistem nilai dan warisan yang menyatukan rakyat Melayu Deli dalam ingatan dan kebanggaan bersama.

Langkah tersebut juga merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi sistem kolonial dan, pasca-revolusi, terhadap sentralisasi negara republik yang sering kali mengabaikan entitas tradisional. Dalam kerangka dakwah kultural, strategi ini menjadi representasi dari pendekatan non-konfrontatif, yang memadukan adat, agama, dan hukum dalam satu kesatuan narasi perjuangan. Sultan Osman tidak melawan negara dengan kekerasan, melainkan dengan menghadirkan Kesultanan sebagai mitra budaya yang sah, berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai lokal. Strategi ini selaras dengan pendekatan dakwah kultural yang dikemukakan oleh para ahli, di mana keberlanjutan nilai-nilai Islam dan budaya lokal dipertahankan melalui mekanisme sosial yang halus, dialogis, dan berbasis hukum (Adde & Rifa'i, 2022; Kutbuddin, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Sultan Osman tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan strategi kultural tingkat tinggi yang memperlihatkan kemampuan adaptasi dan negosiasi antara warisan tradisi dan sistem modern yang terus berkembang.

## 2. Strategi Tanah Kesultanan Deli

Dalam surat perjanjian tahun 1902 antara Sultan Deli dan Deli Maatschappij tampak bahwa sebagian tanah konsesi perkebunan (seperti Mabar dan Deli Tua) dikembalikan kepada Sultan untuk dipergunakan sebagai lokasi Istana, masjid, dan rumah pamilih-pamilih (kerabat dan pejabat adat). Ini adalah strategi simbolik yang sangat penting. Istana dan masjid bukan sekadar tempat tinggal dan ibadah, tetapi merupakan pusat peradaban, otoritas budaya, dan identitas Melayu yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Deli. Dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh tinggal di sana tanpa izin Sultan, beliau menegaskan kembali otoritasnya atas ruang adat, bahkan di bawah pengawasan kekuasaan kolonial. Otoritas ini bukan hanya menyangkut kepemilikan fisik, tetapi merupakan bentuk *kekuasaan simbolik* yang dimaksudkan untuk mempertahankan marwah dan struktur nilai budaya Melayu Deli di tengah penetrasi sistem ekonomi kolonial yang merampas banyak tanah ulayat dan ruang-ruang adat lainnya.

Strategi ini tampak konsisten dalam dokumen lain yang menyebutkan bahwa wilayah-wilayah penting seperti Kampung Kota Maksum dan kawasan sekitar Istana Maimun pernah termasuk dalam tanah konsesi perkebunan Mabar Deli Tua, namun kemudian dikembalikan kepada Sultan Deli melalui surat perjanjian yang disahkan Residen Sumatra Timur pada tahun 1902. Dengan dikembalikannya tanah ini kepada Sultan, terjadi proses rekonstruksi ruang adat yang memungkinkan Sultan mengembalikan fungsionalitas simbolik dari ruang tersebut sebagai pusat kekuasaan budaya dan spiritual. Bahkan dalam naskah hibah notaris tahun 1918, status tanah yang dikembalikan ini ditegaskan kembali sebagai milik pribadi Sultan Ma'mun Al Rasyid, yang menunjukkan bahwa selain strategi

kultural, Sultan juga menggunakan pendekatan legal formal sebagai bagian dari taktik mempertahankan wilayah simbolik Kesultanan di tengah tekanan kapitalisme perkebunan kolonial dan regulasi agraria kolonial yang cenderung mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat lokal. Dalam hal ini, tanah tidak hanya dimaknai sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai sarana kontrol budaya dan representasi otoritas adat yang tetap hidup di bawah sistem dominasi kolonial.

Dalam surat perjanjian tahun 1902 antara Sultan Deli dan Deli Maatschappij, terlihat dengan jelas bahwa sebagian tanah konsesi, termasuk wilayah Mabar dan Deli Tua, dikembalikan kepada Sultan untuk dijadikan lokasi Istana, masjid, serta tempat tinggal para *pamilih-pamilih* (kerabat dan pejabat adat). Dalam pasal kedua ditegaskan bahwa tidak seorang pun dapat tinggal di wilayah tersebut tanpa izin langsung dari Sultan, sebuah pernyataan yang menegaskan otoritas personal sekaligus adat atas ruang tersebut (Dokumen 1, 1902). Dalam perspektif konstruktivisme, hal ini merupakan manifestasi dari *kekuasaan simbolik* yang digunakan untuk mereproduksi nilai-nilai sosial-budaya Melayu di tengah tekanan sistem kapitalisme kolonial yang cenderung menghapus ruang-ruang adat lokal (Wendt, 1992).

Strategi simbolik ini semakin terlihat pada dokumen *Bagian Agraria Provinsi Sumatera Utara* tahun 1953 yang menyatakan bahwa wilayah seperti Kampung Kota Maksom dan kawasan sekitar Istana Maimun, yang semula bagian dari tanah konsesi Mabar Deli Tua, telah dikembalikan kepada Sultan Deli berdasarkan surat perjanjian tahun 1902 dan diperkuat oleh *naskah hibah notaris tahun 1918*. Lebih lanjut, dalam naskah hibah tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik pribadi Sultan Ma'mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, dan bukan sekadar milik Kesultanan secara institusional. Ini menunjukkan adanya pergeseran strategis di mana Sultan memindahkan basis legitimasi dari sistem adat semata menuju pengakuan legal formal melalui sistem hukum notarial kolonial—suatu langkah yang merepresentasikan sinergi antara kekuasaan simbolik dan kekuatan hukum formal (Andaya, 2001; Saidin, 2015).

Melalui *pernyataan resmi Ketua Kerabat Kesultanan Deli* pada tahun 1967, diketahui bahwa grant pertama atas nama Sultan dan istrinya Tengku Riduan Entjek Namiamah mencakup tanah seluas 150 hektare di wilayah Deli Tua, dan hanya diberikan kepada individu yang memiliki hubungan loyalitas historis terhadap Sultan seperti anak mas dan pasal anak yang berbakti secara turun-temurun. Pola ini mencerminkan bahwa strategi penguasaan ruang tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga memperkuat kembali sistem sosial adat melalui prinsip patron-klien, yang menjadi struktur sosial utama dalam masyarakat Melayu tradisional (Reid, 2005; Milner, 1994).

Dengan menggunakan pendekatan legal seperti hibah notaris dan grant resmi, Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam menjalankan strategi kultural-hukum, yakni strategi yang menggabungkan pelestarian nilai-nilai adat melalui simbol budaya (seperti Masjid dan Istana) dengan legitimasi formal melalui sistem hukum negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa Sultan tidak serta-merta menolak keberadaan negara dan hukum kolonial, tetapi justru memanfaatkannya secara taktis untuk melindungi ruang-ruang Pengelolaan dan pengamanan tanah melalui grant, hibah, serta surat perjanjian resmi adalah bentuk rekonstruksi ruang adat yang bukan hanya bertujuan mempertahankan aset fisik, tetapi lebih jauh lagi adalah strategi pemulihan identitas kolektif, otoritas kultural, dan marwah sosial yang sempat tercerabut akibat kolonialisme dan revolusi. Dalam konteks ini, tanah bukan sekadar komoditas agraria, tetapi menjadi media dakwah, representasi kekuasaan adat, dan penopang kesinambungan budaya Melayu di tengah krisis politik dan hukum modern (Anwar, 2022; Athief, 2024; Ichsan & Purwanto, 2023).

### **Tiga Dampak Sosial-Budaya dari Kepemimpinan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam di Kesultanan Deli**

#### **1. Pelestarian Adat dan Budaya Melayu dalam Kepemimpinan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam**

Pasca peristiwa berdarah Revolusi Sosial di Sumatera Timur, di mana banyak bangsawan Melayu menjadi korban kekerasan, terjadi kekosongan kekuasaan simbolik dan kelembagaan adat. Namun, Sultan Osman tidak menanggapi situasi tersebut dengan melakukan perlawanan militer ataupun manuver politik radikal. Sebaliknya, beliau memilih jalur kultural dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Deli. Hal ini tercermin dalam konsistensinya memimpin upacara-upacara adat seperti tepung tawar, pelantikan adat, dan perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi dan Tahun Baru Islam, yang tetap digelar di Istana Maimun meskipun secara politik Kesultanan telah kehilangan otoritas administratifnya (Hamidah et al., 2020).

Sultan Osman tidak hanya dilihat sebagai sosok aristokrat yang kehilangan kekuasaan, tetapi lebih jauh sebagai aktor kultural yang berusaha menghidupkan kembali jati diri Melayu di tengah trauma Revolusi Sosial. Peran tersebut menempatkan beliau bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai penghubung sejarah antara masa lalu kerajaan dan masa kini republik, yang keberadaannya tetap relevan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Deli hingga kini (Hamidah et al., 2020).

## **2. Peran Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam sebagai Mediator Sosial Antar-Etnis Pasca Revolusi Sosial**

Pasca meletusnya Revolusi Sosial di Sumatera Timur tahun 1946, tatanan sosial masyarakat multikultural di kawasan Deli mengalami disorientasi yang mendalam. Konflik tidak hanya menysasar bangsawan Melayu, tetapi juga menimbulkan ketegangan horizontal antara kelompok etnis seperti Melayu, Karo, Tionghoa, India, dan Jawa yang sudah hidup berdampingan sejak masa kolonial. Di tengah kekacauan tersebut, peran Sultan Osman Al Sani Perkasa Alam sebagai figur simbolik Kesultanan Deli menjadi penting dalam upaya rekonsiliasi dan mediasi antar-etnis (Hamidah et al., 2020).

Sebagai pemimpin adat yang dihormati, Sultan Osman dipandang oleh berbagai golongan sebagai tokoh yang memiliki legitimasi moral untuk membangun kembali kepercayaan di antara kelompok masyarakat yang terdampak konflik. Dalam banyak kesempatan, ia menghadiri pertemuan komunitas, acara keagamaan lintas etnis, serta menjalin komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan Melayu maupun non-Melayu. Upaya ini dilakukan untuk meredakan prasangka dan menghindari polarisasi lebih lanjut antara kelompok pribumi dan pendatang (Wijaya & Yanti, 2020).

Pendekatan Sultan Osman dalam merawat harmoni sosial cenderung mengedepankan pendekatan kultural daripada konfrontatif. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong, dan kesetaraan di antara sesama warga Deli. Sebagai contoh, dalam perayaan besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru Islam, atau peringatan Maulid Nabi, Sultan Osman mengundang berbagai perwakilan etnis dan agama untuk hadir bersama di Istana Maimun, sebagai simbol inklusivitas dan toleransi sosial. Hal ini secara tidak langsung turut meredakan trauma kolektif yang muncul akibat tragedi Revolusi Sosial (Armani, 2020).

Melalui peran mediatif tersebut, Sultan Osman memperlihatkan bahwa eksistensi Kesultanan tidak berhenti pada kerangka kekuasaan administratif semata, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang mampu menjembatani keretakan hubungan antar kelompok pasca-konflik. Ia berhasil menunjukkan bahwa budaya Melayu sebagai basis nilai Kesultanan tidak eksklusif, melainkan terbuka untuk dialog dan kerja sama antar-etnis dalam semangat persaudaraan lokal (Wijaya & Yanti, 2020).

## **3. Pemulihan Identitas Kolektif Masyarakat Deli Pasca Revolusi Sosial**

Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur telah meninggalkan trauma mendalam dan disorientasi identitas yang signifikan bagi masyarakat Melayu Deli (Hamidah et al., 2020). Tatanan sosial yang sebelumnya sangat bergantung pada struktur Kesultanan dan adat istiadat mengalami disrupsi besar-besaran, diperparah oleh marginalisasi sosial dan hilangnya figur-figur pemimpin tradisional (Athief, 2024). Salah satu pemicu konflik agraria pasca-kemerdekaan adalah perebutan aset-aset kolonial berupa

tanah perkebunan, yang memicu peristiwa Revolusi Sosial dan berdampak besar pada masyarakat (Wijaya & Yanti, 2020). Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda atas tanah konsesi Kesultanan Deli pada tahun 1958, yang diatur dalam Undang-Undang No. 86 Tahun 1958, menandai hilangnya hak-hak atas sumber daya alam masyarakat adat Melayu Deli, serta memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pihak perkebunan. Tanah-tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat adat Melayu Deli justru dinasionalisasi, menyebabkan klaim pihak ketiga tanpa dasar hak yang jelas (Saidin, 2015). Perubahan struktur sosial dan politik akibat revolusi ini berdampak luas, menggulingkan kekuasaan feodal namun juga menimbulkan kekacauan dan konflik yang berkepanjangan (Athief, 2024).

Upaya pemulihan identitas juga difasilitasi melalui revitalisasi ruang-ruang simbolik penting seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun. Bangunan-bangunan ini tidak hanya dipandang sebagai situs sejarah semata, melainkan juga berfungsi sebagai pusat budaya dan spiritual bagi masyarakat (Hamidah et al., 2020). Di bawah arahan Sultan Osman, Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun dijaga kesakralannya dan dihidupkan kembali dengan beragam kegiatan budaya dan keagamaan. Keberadaan fisik dan spiritual dari bangunan-bangunan ini menjadi jangkar penting dalam membentuk kembali kesadaran kolektif masyarakat tentang jati diri mereka dan asal-usul budaya mereka (Hamidah et al., 2020). Istana Maimun, yang dibangun pada tahun 1888, adalah contoh nyata transformasi sosio-kultural di tengah masyarakat dan warisan Kesultanan Deli di Medan (Usrah & Habib, 2023).

Kepemimpinan Sultan Osman dalam pemulihan identitas kolektif ini lebih dari sekadar nostalgia budaya; ini adalah langkah strategis untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat kohesi dalam masyarakat Deli yang multikultural (Wijaya & Yanti, 2020). Di tengah tuntutan integrasi nasional pada era republik, Sultan Osman berhasil memastikan bahwa masyarakat Melayu tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan budayanya tanpa bertentangan dengan semangat kebangsaan. Strategi adaptif ini memungkinkan Kesultanan Deli untuk tetap relevan sebagai institusi kultural yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Wijaya & Yanti, 2020).

### **Kesultanan sebagai Simbol Keberlanjutan dan Rekonsiliasi Sosial**

Sejarah panjang Kesultanan Deli yang berasal dari kerajaan Haru yang eksis sejak abad ke-13, menunjukkan bahwa keberadaan institusi ini tidak pernah lepas dari dinamika politik dan sosial yang terjadi di Sumatera Timur. Pada masa kolonial Belanda, Kesultanan diubah menjadi institusi simbolik, di mana kekuasaan administratif diambil alih oleh pemerintah kolonial, namun warisan budaya dan simbolisme terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat Melayu dan Islam di kawasan tersebut (Buku Sejarah Kesultanan Deli, 2004). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Kesultanan mengalami proses revitalisasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Osman, yang memperjuangkan peran budaya dan simbolis sebagai perekat sosial dalam masyarakat yang semakin heterogen dan kompleks.

Dalam konteks ini, Sultan Osman menegaskan bahwa Kesultanan tidak lagi berfungsi sebagai institusi feodal yang berkuasa secara politik, melainkan sebagai simbol keberlanjutan dan rekonsiliasi sosial. Melalui upacara adat, pelantikan tokoh masyarakat, serta perayaan keagamaan yang dilakukan secara terbuka dan inklusif, Sultan Osman menunjukkan bahwa Kesultanan dapat berfungsi sebagai ruang budaya yang memperkuat identitas lokal sekaligus meneguhkan toleransi antar etnis dan agama (Wijaya & Yanti, 2020). Penuturan sejarah dan budaya melalui kegiatan ini disadari mampu memperkuat rasa kebersamaan dan memperkokoh solidaritas sosial meskipun terjadi ketegangan akibat perbedaan latar belakang dan konflik sosial di masa lalu.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata budaya dan situs bersejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, dan makam-makam kerabat Kesultanan Deli. Kolaborasi antara Kesultanan dan pemerintah ini

menunjukkan bahwa pengakuan terhadap simbol-simbol budaya lokal dapat memperkuat identitas daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata sekaligus memperkuat solidaritas sosial (Hamidah et al., 2020). Hal ini sejalan dengan teori rekonsiliasi sosial yang menekankan pentingnya simbolisme dan identitas dalam proses pembentukan perdamaian dan harmoni masyarakat pasca-konflik (Armenakis & Bedeian, 1999).

Peran Sultan Osman dalam membangun narasi budaya ini juga mengandung dimensi psikologis yang mendalam. Bagi masyarakat Melayu, terutama generasi tua yang menyaksikan tragedi 1946, kehadiran kembali figur Sultan di ruang publik memberikan harapan akan pemulihan harga diri kolektif dan juga pengakuan atas warisan budaya mereka. Bagi generasi muda yang hidup di masa modern, kehadiran Sultan Osman menjadi simbol bahwa adat dan budaya tetap relevan dan mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang penuh dinamika perubahan (Armani, 2020). Dengan demikian, Kesultanan bertransformasi sebagai kekuasaan simbolik yang mampu memperkuat hubungan sosial lintas generasi dan etnis, sekaligus sebagai alat untuk memperkokoh jati diri budaya dan nasionalisme lokal.

Peranan Sultan Osman dalam mengubah simbol Kesultanan menjadi instrumen rekonsiliasi dan keberlanjutan budaya menunjukkan bahwa institusi Kesultanan tidak harus bergantung pada kekuasaan politik, melainkan mampu beradaptasi sebagai kekuatan budaya yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan. Kesultanan Deli, dalam kerangka ini, tetap relevan sebagai ruang simbolik yang menegaskan identitas budaya lintas waktu, sekaligus sebagai elemen penting dalam membangun kembali jalinan sosial masyarakat Deli yang pernah mengalami ketegangan sosial dan konflik (Wijaya & Yanti, 2020).

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kehilangan kekuasaan formal, Sultan Osman tetap memainkan peran penting sebagai simbol budaya, pemersatu sosial, dan pelindung nilai-nilai tradisi Melayu. Ia menjadi contoh keberhasilan transformasi peran elite tradisional dalam menghadapi perubahan zaman secara damai dan bermartabat. Peran Sultan Osman dalam membangun narasi budaya ini juga mengandung dimensi psikologis yang mendalam. Bagi masyarakat Melayu, terutama generasi tua yang menyaksikan tragedi 1946, kehadiran kembali figur Sultan di ruang publik memberikan harapan akan pemulihan harga diri kolektif dan juga pengakuan atas warisan budaya mereka. Bagi generasi muda yang hidup di masa modern, kehadiran Sultan Osman menjadi simbol bahwa adat dan budaya tetap relevan dan mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang penuh dinamika perubahan. Dengan demikian, Kesultanan bertransformasi sebagai kekuasaan simbolik yang mampu memperkuat hubungan sosial lintas generasi dan etnis, sekaligus sebagai alat untuk memperkokoh jati diri budaya dan nasionalisme lokal.

## REFERENSI

- Ad Ins. (2023). *Verifikasi Data Pelanggan: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya*. <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>
- Adde, E., & Rifa'i, A. (2022). Strategi dakwah kultural di Indonesia. *Jurnal Dakwatulislam*, 7(1), 59–78.
- Andaya, B. W. (2001). *The Kingdom of Johor and Modern Colonialism*. In *Southeast Asia in the Early Modern Era*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anwar, A. (2022). *Kesultanan Deli dan Politik Identitas Pasca-Kolonial*. Medan: Pusaka Melayu.
- Anwar, S. (2022). Deli dan Sumatera Timur dalam pusaran politik kawasan kolonial Belanda. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2), 466–474. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.6075>

- Athief, M. R. (2024). *Marwah Melayu Pasca-Revolusi: Strategi Kebudayaan Kesultanan Deli dalam Masa Transisi*. Medan: Penerbit Sejarah Deli.
- Avionita, L. (2023). *Perubahan sosial di Kesultanan Deli tahun 1888–1946 M* (Skripsi Sarjana). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Baderan, S. (2014). Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brazil. *Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brazil*, 11, 100–108.
- Deegan, C. (2019). Legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Dokumen Deli. (1902). *Surat Perjanjian Sultan Deli dengan Deli Maatschappij*, 8 Mei 1902.
- Dokumen Deli. (1953). *Surat Bagian Agraria Provinsi Sumatera Utara kepada Wali Kota Medan*, 17 Februari 1953.
- Dokumen Deli. (1967). *Penjelasan Ketua Kerabat Kesultanan Deli*, 29 Juni 1967.
- Guritno, D., & Sasongko, S. (2021). *Historiografi* (Issue January 2018). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14953.62565>
- Harahap, H., & Ramadhani, D. (2019). *Laskar revolusioner Sumatera Timur: Dari revolusi sosial di Simalungun sampai kudeta Gubernur Sumatera*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. F., Triase, & Muliani Harahap, A. (2024). Augmented Reality Pengenalan Raja Kesultanan Deli Medan Berbasis Mobile. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 5771–5780.
- Hidayat, S. (2025). *Transisi demokrasi dan urgensi pendidikan politik warga*. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Disampaikan dalam FGD Series KK-AIPI, 21 April 2025.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Ichsan, M., & Purwanto, A. (2023). Transformasi Kesultanan Deli dalam Transisi Politik Pasca-Kolonial. *Jurnal Sejarah Politik dan Identitas Lokal*, 11(1), 44–67.
- Kutbuddin, A. (2016). Strategi dakwah kultural dalam konteks Indonesia. *Mawa'izh*, 1(2), 263–268.
- Kutbuddin, M. (2016). *Dakwah Budaya dan Ketahanan Identitas Lokal di Era Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahalli, K., & Yani, A. (2020). *Transisi demokrasi dan urgensi pendidikan politik warga*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Martin, A. (2010). Quo Vadis Transisi Demokrasi: Arah Demokratisasi Indonesia ditengah Demokrasi Pasar. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 7(1), 27–40.
- Maulimardewa, M., Isjoni, I., & Kamaruddin, K. (2023). Pengaruh revolusi sosial terhadap Kesultanan Melayu di Sumatera Timur tahun 1946–1947. *Universitas Riau*. <https://ejournal.unri.ac.id>
- Milner, A. (1994). *The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*. Cambridge University Press.
- Patten, D. (2019). Seeking legitimacy. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 634, 2003–2005.
- Rafni, A. (2002). Transisi menuju demokrasi di Indonesia. *Demokrasi*, 1(1), 8–18. <https://media.neliti.com/media/publications/241717-transisi-menuju-demokrasi-di-indonesia-6f4b9bc4.pdf>
- Rahayu, S., Lukitaningsih, C. G. M., Sitepu, S. Y., Saragih, S. N., & Sihombing, E. U. (2024). Revolusi Sosial Sumatera Timur di Kean Kota Pinang tahun 1946. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 15776–15788.
- Starshov, E., & Fefelov, D. (2024). Legitimacy of Multinational Enterprises: Systematic Review and Research Agenda (pp. 1–23).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rake Sarasin.
- Sukmana, W. J. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(April), 1–4. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3512>

- Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). *Dinamika sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri jejak Masjid Kesultanan Serdang*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Takari, M., B.S., A. Z., & Dja'far, F. M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. USU Press. <http://usupress.usu.ac.id/10555>
- Starshov, E., & Fefelov, D. (2024). Legitimacy of Multinational Enterprises: Systematic Review and Research Agenda (pp. 1–23).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rake Sarasin.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(April), 1–4. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3512>
- Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). *Dinamika sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara: Menelusuri jejak Masjid Kesultanan Serdang*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Takari, M., B.S., A. Z., & Dja'far, F. M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. USU Press. <http://usupress.usu.ac.id>
- Wahid, M. (2015). *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. Yogyakarta: LKiS.
- Weiss, T. G. (2003). *The United Nations and Changing World Politics* (5th ed.). Westview Press. (Dikutip dalam Sari, 2022).
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wijaya, D. A., & Yanti, F. (2020). Konflik agraria pada masa revolusi sosial di Sumatera Timur, 1946–1955. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.24127/hj.v5i2.10555>